

## **Bonding, Bridging, dan Linking sebagai Modal Sosial dalam Pemulihan dan Keberlanjutan Desa Wisata Pascapandemi**

**Nadia Itona Siregar<sup>1</sup>, Rahmawati Zulfiningrum<sup>2</sup>, Candra Yudha Satriya<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Dian Nuswantoro

Email: nadia.itonasiregar@dsn.dinus.ac.id

**Abstract:** The tourism sector contributes significantly to foreign exchange and national income, but has experienced a sharp decline due to the COVID-19 pandemic. This article examines the role of bonding, bridging, and linking as forms of social capital in the recovery and sustainability of tourism villages in the post-pandemic period. The study adopts a qualitative approach with a case study design conducted in Wanurejo Tourism Village, Magelang Regency, Indonesia. Data were collected through semi-structured interviews, field observations, and document analysis involving village officials, tourism village managers, tourism entrepreneurs, and community leaders. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman. The findings indicate that bonding social capital played a dominant role during the early recovery phase by strengthening social solidarity, trust, and mutual aid practices as an informal social safety net. Bridging social capital facilitated cross-group networks and expanded access to information, innovation, and economic opportunities, although its benefits were unevenly distributed. Meanwhile, linking social capital was crucial for long-term recovery by enabling access to policies, financial assistance, and institutional support, while also reflecting power relations that potentially marginalize vulnerable groups. These findings emphasize the importance of inclusive and equitable governance in optimizing social capital for sustainable tourism village recovery.

**Keywords:** Social capital; rural tourism; bonding; bridging; linking

**Abstrak:** Sektor pariwisata berkontribusi signifikan terhadap devisa dan pendapatan nasional, namun mengalami penurunan tajam akibat pandemi COVID-19. Artikel ini menganalisis bagaimana *bonding*, *bridging*, dan *linking* sebagai modal sosial dalam pemulihan dan keberlanjutan desa wisata pascapandemi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Desa Wisata Wanurejo, Kabupaten Magelang. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan melibatkan pemerintah desa, pengelola desa wisata, pelaku usaha pariwisata, serta tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial *bonding* berperan dominan pada fase awal pemulihan melalui penguatan solidaritas, kepercayaan, dan praktik gotong royong sebagai jaring pengaman sosial informal. Modal sosial *bridging* berfungsi memperluas jejaring lintas kelompok dan membuka akses terhadap informasi, inovasi, serta peluang ekonomi, namun pemanfaatannya cenderung tidak merata. Sementara itu, modal sosial *linking* berperan penting dalam pemulihan jangka panjang melalui akses terhadap kebijakan, program bantuan, dan dukungan kelembagaan, sekaligus memperlihatkan relasi kuasa yang berpotensi memmarginalkan kelompok rentan. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan modal sosial yang inklusif dan berkeadilan dalam pemulihan desa wisata.

**Kata kunci:** Modal sosial; desa wisata; *bonding*; *bridging*; *linking*

### **Pendahuluan**

Sektor pariwisata memegang peranan yang sangat krusial sebagai salah satu penyumbang utama devisa dan pendapatan negara, dengan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan sektor pariwisata membuka

berbagai peluang usaha, baik dalam bentuk produk lokal dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun dalam bentuk jasa (Arief et al., 2022). Perjalanan dan pariwisata telah menjadi salah satu sektor terpenting dalam perekonomian dunia, menyumbang hingga 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Global dan lebih dari 320 juta lapangan kerja di seluruh dunia (Behsudi, 2020). Pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif bagi negara-negara yang bergantung pada pariwisata, seperti misalnya daerah Kawasan Asia Tenggara yang mengalami keterpurukan dalam industri pariwisata selama masa pandemi COVID-19. Beberapa negara utama anggota ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan bahkan Indonesia mencatat bahwa jumlah kunjungan wisatawan asing sangat sedikit pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya dengan total jumlah kunjungan turis di enam negara tersebut di tahun 2020 hanya mencapai 22,92 juta. Jumlah ini sangat rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 117,91 juta kunjungan wisatawan atau sekitar 80,6%. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan asing di enam negara tersebut lebih parah dibandingkan dengan rata-rata kondisi global yang mengalami penurunan sebesar 73,9% (Sucipto, 2021).

Pada tahun 2020 saat awal-awal pandemi COVID-19 melanda Indonesia, menurut Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2020 menurun tajam menjadi 4,052 juta kunjungan, atau sekitar 75 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini berdampak luas pada sektor pariwisata dan industri terkait. Data Badan Pusat Statistik mencatat rendahnya tingkat hunian akomodasi berbayar serta terjadinya pengurangan jam kerja, perumahan, dan sebanyak 409.000 tenaga kerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan pada tahun 2020. Disisi lain, sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia dan menjadi salah satu sumber utama penerimaan devisa negara (Kristianto et al., 2021). Kondisi ini menyoroti betapa rentannya sektor pariwisata terhadap krisis global, dan perlunya strategi adaptasi yang efektif.

Pada tahun 2022 seiring dengan menurunnya kasus COVID-19 dan mulai diberlakukannya aktivitas normal oleh Pemerintah Indonesia, sektor wisata domestik Indonesia konsisten membaik. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan jumlah perjalanan wisata nusantara sebesar 19,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat sebanyak 734,86 juta perjalanan wisata nusantara (wisnus) selama periode 2022. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19 (tahun 2019), perjalanan wisnus tumbuh 1,76%. Sektor pariwisata domestik Indonesia kian menunjukkan pemulihan sejak tahun 2022, Jawa Tengah menjadi salah satu tujuan utama perjalanan wisata Nusantara ke tiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Akan tetapi, pemulihan wisata domestik ini hanya baru terlihat pada beberapa provinsi tujuan yang di antaranya adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah (Badan Pusat Statistik, 2023).

Salah satu kondisi pariwisata yang kembali pulih pascapandemi di Jawa Tengah adalah pariwisata dikawasan Candi Borobudur yaitu Desa Wisata Wanurejo. Desa Wisata Wanurejo memiliki lokasi strategis yang berdekatan dengan Candi Borobudur, hanya sekitar satu kilometer jauhnya, dan menjadi bagian penting dari kawasan wisata di Kabupaten Magelang. Dengan luas 275 hektar atau 4,98% dari Kecamatan Borobudur, Desa Wanurejo dikelilingi oleh keindahan alam, seperti kaki Bukit Menoreh serta aliran Sungai Progo dan Sungai Sileng. Keberhasilan pemulihan di Desa Wisata Wanurejo ditopang oleh kolaborasi antar sembilan dusun yang menghadirkan daya tarik wisata secara terintegrasi. Pola ini mencerminkan praktik

pariwisata berkelanjutan yang pada era pascapandemi semakin relevan karena tidak hanya mendukung pemulihan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial, budaya, dan lingkungan.

Pariwisata berkelanjutan menjadi semakin penting di era pascapandemi, karena pendekatan ini tidak hanya mendukung pemulihan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial, budaya, dan lingkungan. Pandemi COVID-19 telah mengungkap kerentanan sektor pariwisata yang terlalu bergantung pada volume kunjungan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal (Sari et al., 2022). Pariwisata berkelanjutan menawarkan solusi dengan menekankan praktik-praktik yang ramah lingkungan, menghormati budaya lokal, dan memprioritaskan partisipasi masyarakat setempat sebagai aktor utama dalam pembangunan pariwisata (Sangchumnong, 2018). Pendekatan ini juga mendorong diversifikasi produk pariwisata, sehingga sektor ini lebih tangguh terhadap krisis di masa depan. Sebagai contoh, desa wisata seperti Candirejo di Kabupaten Magelang, telah mengadopsi prinsip pariwisata berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan atraksi wisata berbasis budaya dan ekowisata (Satriya et al., 2023). Selain memberikan manfaat ekonomi langsung kepada warga, pendekatan ini juga menjaga kelestarian budaya dan lingkungan setempat. Oleh karena itu, pariwisata berkelanjutan di era pascapandemi bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menciptakan sektor pariwisata yang lebih inklusif, tangguh, dan berdampak positif bagi lingkungan serta masyarakat lokal (Khalid et al., 2019). Dalam konteks tersebut, pariwisata berkelanjutan di era pascapandemi tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga strategi jangka panjang untuk membangun sektor pariwisata yang lebih inklusif, tangguh, dan berdampak positif bagi lingkungan serta masyarakat lokal. Penerapan strategi ini sangat bergantung pada keberadaan modal sosial, yang berperan penting dalam pengembangan desa wisata melalui penguatan kebersamaan, kepercayaan, dan kerja kolektif antaraktor, sehingga memungkinkan tercapainya kemajuan bersama (Khalid et al., 2019; Handaka et al., 2015).

Modal sosial memiliki peran krusial dalam pengembangan desa wisata karena modal sosial dapat menjadi unsur utama dalam menggerakkan kebersamaan, pergerakan, ide, saling percaya, dan memberikan keuntungan untuk mencapai kemajuan bersama (Handaka et al., 2015). Modal sosial dapat dimanfaatkan sebagai pilar utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, karena hubungan sosial yang kuat mampu mendukung kolaborasi, menjaga keseimbangan lingkungan, dan memperkuat keberlanjutan ekonomi serta budaya (Rocca & Zielinski, 2022). Modal sosial mengacu pada sumber daya yang terdapat dalam hubungan sosial dan jaringan yang ada dalam suatu masyarakat, termasuk norma, nilai, dan hubungan sosial antar individu, kelompok, dan institusi (Li & Hunter, 2015). Modal sosial, yang terdiri dari *bonding* (hubungan antaranggota kelompok homogen), *bridging* (hubungan lintas kelompok), dan *linking* (hubungan dengan institusi eksternal), memberikan landasan untuk membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat lokal (Bakker et al., 2019).

Maka dengan memanfaatkan modal sosial, masyarakat dapat saling mendukung dalam menjaga kelestarian lingkungan, mempromosikan budaya lokal, dan membangun jejaring dengan pihak luar seperti pemerintah dan sektor swasta untuk mendatangkan investasi dan pelatihan (Ooi et al., 2015). Hal ini penting untuk memastikan pariwisata tidak hanya menguntungkan generasi saat ini tetapi juga melestarikan sumber daya bagi generasi

mendatang. Misalnya Desa Wisata Nglangeran di Yogyakarta, di mana modal sosial *bonding* terlihat dari solidaritas warga dalam melestarikan Geopark Nglangeran. Modal sosial *bridging* terwujud dalam kolaborasi dengan komunitas wisata lain untuk berbagi praktik terbaik, sementara *linking* terlihat dari kemitraan dengan UNESCO dan pemerintah daerah untuk mempromosikan Nglangeran sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan (Manaf et al., 2018). Sinergi ini telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan modal sosial adalah strategi yang efektif untuk memastikan pengembangan pariwisata berkelanjutan, karena dapat mendorong kolaborasi, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan secara harmonis.

Modal sosial terbukti menjadi fondasi utama bagi keberhasilan desa wisata. Dengan adanya modal sosial, masyarakat lokal dapat saling bekerja sama untuk menciptakan produk wisata yang unik, melestarikan budaya, serta membangun hubungan dengan pihak luar, seperti pemerintah dan pelaku industri pariwisata. Modal sosial juga membantu mengatasi tantangan internal, seperti konflik kepentingan, melalui komunikasi yang inklusif dan berbasis kepercayaan (Panday et al., 2021). Sebagai contoh, di Desa Wisata Candirejo, modal sosial *bonding* terlihat dari kekompakan warga dalam mengelola homestay dan atraksi budaya. Modal sosial *bridging* terwujud dalam kerjasama dengan komunitas wisata lain dan kelompok relawan, sementara *linking* terlihat dari hubungan yang kuat dengan pemerintah daerah serta lembaga donor untuk mendapatkan pelatihan dan pendanaan. Kombinasi ini telah membantu desa wisata berkembang pesat tanpa kehilangan identitas lokalnya (Fatimah, 2018). Dengan demikian, modal sosial bukan hanya aset bagi komunitas lokal, tetapi juga elemen strategis yang mendukung pengembangan desa wisata secara berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya (Rocca & Zielinski, 2022).

Penelitian ini mengeksplorasi peran modal sosial dalam meningkatkan ketahanan terhadap bencana, dengan fokus pada bagaimana berbagai bentuk modal sosial (*bonding*, *bridging*, dan *linking*) berfungsi di komunitas desa wisata pascapandemi COVID-19. Modal sosial dianggap sebagai elemen kunci dalam membantu komunitas desa wisata menghadapi tantangan pascapandemi, seperti pemulihan ekonomi dan sosial (Musavengane & Kloppers, 2020). *Bonding* mendukung solidaritas antaranggota komunitas, *bridging* memungkinkan kerjasama lintas kelompok atau komunitas wisata lainnya, dan *linking* memperkuat akses terhadap bantuan dari pemerintah atau lembaga eksternal. Kombinasi ketiga bentuk modal sosial ini membantu komunitas desa wisata tidak hanya bertahan tetapi juga beradaptasi dan pulih dari dampak pandemi. Sebagai contoh, di Desa Wisata Borobudur, *bonding* terlihat dari gotong royong masyarakat lokal dalam memulihkan operasional *homestay* dan atraksi wisata. *Bridging* terwujud dalam kolaborasi antara desa wisata untuk menciptakan paket wisata bersama, sementara *linking* memungkinkan mereka mendapatkan pendanaan dan pelatihan dari pemerintah daerah serta organisasi internasional (Satriya et al., 2023). Modal sosial ini membantu komunitas membangun ketahanan sekaligus meningkatkan daya saing. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pentingnya modal sosial sebagai fondasi bagi komunitas desa wisata untuk menghadapi dan pulih dari krisis seperti pandemi, sekaligus memperkuat ketahanan jangka panjang terhadap bencana di masa depan.

Meskipun modal sosial diakui sebagai elemen penting untuk pemulihan dan ketahanan terhadap bencana, penelitian mengenai cara kerjanya di daerah pedesaan, terutama desa wisata

yang terdampak pandemi COVID-19, masih terbatas. Modal social pada dimensi *bonding*, *bridging*, dan *linking*, berperan dalam mempercepat pemulihan masyarakat melalui dukungan sosial, kolaborasi lintas kelompok, dan akses ke sumber daya eksternal. Namun, penerapannya di desa wisata yang memiliki struktur sosial dan ekonomi unik memerlukan kajian lebih mendalam. Desa wisata sering kali menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada pariwisata, keterbatasan jaringan eksternal, dan perlunya adaptasi pada norma baru pascapandemi. Penelitian yang tidak memperhatikan bagaimana modal sosial berinteraksi dengan faktor-faktor ini meninggalkan celah dalam pemahaman tentang efektivitasnya. Beberapa desa wisata di Indonesia, seperti Candirejo dan Nglanggeran, menunjukkan variasi dalam pemanfaatan modal sosial untuk pemulihan krisis. Di satu sisi, dukungan dari kerabat dan komunitas lokal (*bonding*) memainkan peran besar, namun di sisi lain, keterbatasan hubungan dengan lembaga eksternal (*linking*) sering menjadi penghambat pemulihan yang lebih cepat (Fatimah, 2018; Manaf et al., 2018).

Contoh lain adalah di Kelurahan Kemijen dan Krobokan, Kota Semarang, yang sering dilanda banjir dan rob. Masyarakat di kedua kelurahan ini memanfaatkan modal sosial mereka dengan membentuk jaringan kerjasama antarwarga untuk melakukan tindakan preventif dan responsif terhadap bencana (Norzistya & Handayani, 2020). Mereka secara rutin mengadakan pertemuan komunitas untuk membahas strategi penanggulangan banjir, seperti pembersihan saluran air secara berkala dan pembangunan sistem drainase yang lebih efektif. Selain itu, mereka juga mengembangkan sistem peringatan dini berbasis komunitas dan menyusun rencana evakuasi bersama. Melalui partisipasi aktif dan solidaritas yang tinggi, masyarakat di Kemijen dan Krobokan mampu meningkatkan ketahanan mereka terhadap bencana banjir.

Pandemi COVID-19 telah menghadirkan tantangan unik bagi sektor pariwisata, termasuk di Desa Wanurejo, sehingga membutuhkan pendekatan baru dalam mengelola pemulihan dan transformasi pariwisata. Situasi pascapandemi menuntut strategi yang mempertimbangkan perubahan perilaku wisatawan, penurunan ekonomi, dan perlunya adaptasi terhadap protokol kesehatan, semuanya memengaruhi daya tahan sektor pariwisata. Di Desa Wanurejo, peran modal sosial seperti gotong royong dan jaringan komunitas telah terbukti membantu memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pelaku pariwisata, dan pemerintah dalam menghidupkan kembali kegiatan pariwisata berbasis komunitas (Prakoso et al., 2021). Dengan demikian, kerangka kerja penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana modal sosial dapat dioptimalkan untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata sekaligus mendorong transformasi menuju keberlanjutan yang lebih baik. Membangun kembali pariwisata secara berkelanjutan membutuhkan strategi inovatif dan kolaborasi yang dapat difasilitasi oleh modal sosial. Hal ini menunjukkan perlunya analisis kontekstual terhadap dinamika modal sosial di setiap desa wisata. Maka dengan demikian, penelitian yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami mekanisme kerja modal sosial di desa wisata terdampak pandemi, agar dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan ketahanan dan pemulihan di masa depan.

## Metode

Penelitian ini berakar pada paradigma konstruktivis yang memandang pengetahuan sebagai produk dari interpretasi dan pemahaman peneliti terhadap subjek. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus (Djamba & Neuman, 2002). Melalui studi kasus peneliti mendapatkan deskripsi dan analisis yang rinci berkaitan dengan, Pertama, bagaimana hubungan dalam komunitas inti desa wisata, seperti keluarga, tetangga, dan kelompok lokal, berperan dalam menopang proses pemulihan melalui dukungan sosial dan solidaritas internal. Kedua, bagaimana hubungan dengan kelompok di luar komunitas inti, termasuk komunitas desa wisata lain, asosiasi pariwisata, dan pelaku usaha, berkontribusi terhadap pemulihan desa wisata melalui perluasan jejaring, akses informasi, dan peluang ekonomi baru, sekaligus mengungkap dinamika eksklusi sosial yang muncul ketika bantuan eksternal mulai berperan dan berpotensi melemahkan solidaritas internal. Ketiga, bagaimana keterhubungan dengan pemerintah, institusi keuangan, dan organisasi formal lainnya memengaruhi keberlanjutan desa wisata setelah pandemi, khususnya dalam akses terhadap sumber daya, kebijakan, dan dukungan kelembagaan.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur kepada pemangku kepentingan utama dalam pengembangan pariwisata Desa Wanurejo (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Pokdarwis, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan Pengelola Wisata Desa dan BUMDes, Ketua Koperasi Wanurejo, tokoh masyarakat, kelompok tani, pemilik *homestay* dan pelaku usaha), observasi, dan dokumen seperti laporan kegiatan, informasi potensi daerah, dan data olahan lainnya yang relevan terkait modal sosial dan pengembangan pariwisata. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana berbagai bentuk modal sosial (*bonding*, *bridging*, dan *linking*) berfungsi dalam membantu komunitas menghadapi tantangan pemulihan ekonomi dan sosial, serta bagaimana komunikasi membentuk realitas sosial dan adaptasi Sistem Sosial (Hall *et al.*, 2017). Pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama merumuskan pertanyaan kunci yang berkaitan dengan bagaimana peran modal sosial dalam meningkatkan ketahanan terhadap bencana pandemi COVID-19, kemudian tahap berikutnya adalah mengetahui bagaimana proses komunikasi membentuk realitas sosial dan menciptakan makna dari berbagai bentuk modal sosial (*bonding*, *bridging*, dan *linking*) berfungsi di komunitas desa wisata pascapandemi COVID-19.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles (Miles *et al.*, 2014), yang meliputi tiga langkah utama yaitu kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, direkam, ditranskrip, dan dicatat, untuk dianalisis secara sistematis. Pengkodean induktif dilakukan secara manual untuk mengeksplorasi tema utama yang relevan dengan ketahanan dan pariwisata. Pada proses analisis, tema-tema diidentifikasi berdasarkan frekuensi kemunculan dalam wawancara dan relevansinya dengan pertanyaan penelitian. Data dianggap mencapai saturasi ketika tidak ditemukan informasi baru (Weis *et al.*, 2021). Pendekatan pengkodean induktif ini memungkinkan kode berkembang selama analisis dan membuka peluang munculnya teori atau konsep baru yang sepenuhnya didasarkan pada data, tanpa bias dari gagasan yang sudah ada sebelumnya.

## Hasil dan Pembahasan

Modal sosial dipahami sebagai sumber daya relasional yang memungkinkan komunitas desa wisata untuk mempertahankan kohesi sosial, membangun jejaring lintas kelompok, serta

mengakses dukungan kelembagaan dalam menghadapi tantangan pascapandemi, khususnya pada aspek pemulihan sosio-ekonomi pariwisata. Dalam konteks pembangunan desa wisata, modal sosial berfungsi sebagai fondasi non-material yang mendukung kerja kolektif, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan berkelanjutan (Alfrojems & Anugrahini, 2019). Oleh karena itu, temuan penelitian ini disajikan dan dibahas berdasarkan tiga komponen modal sosial tersebut sebagai konstruk analitis utama untuk memahami dinamika pemulihan dan keberlanjutan desa wisata. Analisis temuan dilakukan secara tematik dengan menelusuri bagaimana *bonding*, *bridging*, dan *linking* dimobilisasi dan dimaknai oleh aktor-aktor lokal dalam berbagai tahapan pemulihan pariwisata setelah pandemi (Bakker et al., 2019).

### **Eksplorasi Hubungan Komunitas Internal dalam Membantu Pemulihan Pascapandemi**

Fase pertama dalam tanggap bencana menyoroti pentingnya mobilisasi kolektif untuk penyelamatan dan pemberian bantuan segera setelah pandemi berakhir, yang mengandalkan modal sosial yang sudah ada di masyarakat. Dalam situasi darurat, jaringan sosial yang kuat memungkinkan individu dan kelompok untuk berbagi sumber daya, informasi, dan dukungan emosional, sehingga mempercepat proses pemulihan awal. Misalnya, di Desa Wanurejo, tradisi gotong royong yang mengakar menjadi dasar solidaritas kolektif, di mana masyarakat secara sukarela membantu tetangga yang terdampak melalui penggalangan dana, distribusi logistik, dan pendirian pos bantuan. Sistem sosial seperti tradisi gotong royong dan sistem bergilir dalam pelayanan wisatawan mampu memberdayakan masyarakat lokal, meningkatkan pendapatan, mempersempit kesenjangan sosial, serta memperkuat koneksi sosial antar warga (Aji, 2020).

Keberadaan tokoh masyarakat dan kelompok formal seperti koperasi Desa Wanurejo membantu menjembatani kesenjangan sosial dan memobilisasi sumber daya secara merata, meskipun terdapat perbedaan dalam status ekonomi atau latar belakang. Pemerintah berperan sebagai modal sosial dengan bertindak sebagai fasilitator yang mendorong pelestarian tradisi sekaligus memperkuat kohesi sosial masyarakat. Melalui dukungan kebijakan, pembinaan, dan fasilitasi kegiatan budaya, pemerintah dapat mempererat hubungan sosial dan menjaga harmoni komunitas. Peran ini menjadi krusial dalam pengembangan pariwisata, karena lingkungan sosial yang solid dan budaya yang terjaga akan menciptakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan serta mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan berbasis kearifan local (Coleman, 1990). Dengan memanfaatkan modal sosial yang ada dan mengatasi perbedaan yang ada di masyarakat, fase mobilisasi kolektif ini dapat menciptakan pondasi awal yang kokoh untuk merespons krisis secara inklusif dan berkeadilan.

Menurut Gilang, *bonding* memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antar anggota komunitas, seperti yang terlihat pada para peternak ayam broiler di Desa Punaga (Gilang et al., 2024). Kedekatan sosial di antara mereka mempermudah kolaborasi, seperti peminjaman alat, berbagi informasi teknis, serta saling membantu dalam berbagai kegiatan peternakan. Relasi ini juga ditandai dengan tumbuhnya rasa saling percaya dan praktik resiprositas, misalnya pemberian ayam atau imbalan sebagai bentuk apresiasi atas bantuan. Temuan ini menguatkan hasil penelitian bahwa ikatan sosial yang kuat dapat menjadi fondasi

penting dalam mendukung keberhasilan aktivitas kolektif berbasis komunitas, termasuk dalam pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata lokal.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, implementasi modal sosial *bonding* di Desa Wisata Wanurejo terutama tercermin dalam hubungan antar anggota komunitas yang dilandasi kedekatan sosial dan solidaritas, khususnya pada fase awal pandemi. Modal sosial ini tampak dalam praktik gotong royong masyarakat, di mana warga saling mendukung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok, terutama bagi anggota komunitas yang kehilangan sumber pendapatan akibat penutupan sementara sektor pariwisata. Selama periode tersebut, komunitas lokal membentuk kelompok informal untuk mendistribusikan bantuan pangan kepada keluarga terdampak. Pemilik sawah atau lahan pertanian, misalnya, berbagi hasil panen atau persediaan bahan makanan dengan warga yang bekerja di sektor pariwisata. Selain itu, kegiatan keagamaan seperti pengajian dan kenduri tetap dilaksanakan dalam skala terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan, sebagai upaya menjaga kebersamaan di tengah situasi krisis.

Pada aspek *bonding*, komunikasi dalam komunitas desa wisata berlangsung secara intens, personal, dan emosional karena bertumpu pada hubungan kekerabatan, kedekatan sosial, serta kesamaan nilai dan pengalaman kolektif menghadapi krisis. Interaksi yang terjadi melalui aktivitas sehari-hari, pertemuan informal, kerja bakti, dan kegiatan sosial-keagamaan membangun rasa aman, kepercayaan, dan empati di antara warga. Dalam konteks pascapandemi, komunikasi yang bersifat internal ini mendorong praktik saling membantu secara spontan tanpa mekanisme formal, sehingga membentuk solidaritas berbasis gotong royong. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi *bonding* berfungsi sebagai *social safety net* yang memungkinkan komunitas bertahan ketika akses terhadap sumber daya eksternal terbatas, sekaligus memperkuat kohesi sosial serta ketahanan emosional dan psikologis kolektif sebagai fondasi awal pemulihian sosial-ekonomi.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa komunikasi internal warga Desa Wisata Wanurejo berlangsung secara intens dan emosional melalui praktik gotong-royong, pertemuan informal, serta aktivitas keagamaan dan budaya, sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Kalau ada warga yang kesulitan, terutama waktu pandemi kemarin, ya langsung dibantu ramai-ramai. Tidak pakai aturan tertulis, sudah paham sendiri”* (wawancara dengan SWT).

Hasil observasi peneliti juga memperlihatkan bahwa interaksi antarwarga tidak hanya terjadi dalam forum resmi desa, tetapi lebih sering melalui ruang-ruang informal seperti kerja bakti, pengajian, dan kegiatan adat. Pola ini memperkuat hubungan interpersonal yang bersifat dekat dan berulang. Selain itu, norma-norma sosial yang berkembang di komunitas Desa Wanurejo saling berkelindan dengan nilai-nilai yang memperkuat *bonding*, khususnya dalam praktik saling membantu, sikap ramah, keterbukaan, serta semangat *guyub rukun*. Nilai-nilai tersebut telah terbentuk dan direproduksi dalam kehidupan sosial masyarakat selama bertahun-tahun, sehingga menjadi bagian dari identitas komunitas. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kepedulian dan komitmen terhadap sesama tercermin baik dalam interaksi sehari-hari antarwarga maupun dalam hubungan dengan wisatawan. Masyarakat secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sukarela dan penggalangan bantuan, terutama dalam bentuk kontribusi tenaga

melalui kerja bakti dan gotong royong. Salah satu contoh yang teramatii adalah dukungan logistik dan bantuan lain yang diberikan secara kolektif kepada warga yang harus menjalani karantina selama pandemi.

*“Masyarakat juga banyak secara sukarela membantu tetangga melalui saling jaga dan antar makanan. Pemilik sawah juga banyak menyumbangkan hasil pertaniannya untuk kepentingan warga yang kekurangan ataupun yang bekerja di wisata karena sepi pengunjung”* (wawancara dengan SSL).

Praktik saling membantu dan sikap keramahan ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial internal, tetapi juga membentuk citra Desa Wisata Wanurejo sebagai destinasi yang ramah dan bersahabat, yang secara bertahap memperkuat daya tariknya bagi wisatawan. Norma keramahan khas Desa Wanurejo memainkan peran penting dalam meningkatkan pemasaran serta memperkuat identitas komunitas sekaligus meningkatkan daya tarik destinasi bagi wisatawan. Keramahan yang hangat dan ramah keluarga bukan hanya nilai budaya yang dijunjung oleh masyarakat setempat, tetapi juga menjadi elemen pembeda dalam strategi branding pariwisata di Desa Wisata Wanurejo. Seperti yang dikemukakan oleh KDS, seorang tokoh masyarakat:

*“Keramahan khas desa, sopan santun, banyak pencitraan dan pencitraan kami mengarah ke sana. Ini adalah area wisata pedesaan yang luar biasa. Dengan citra yang menunjukkan keindahan lansekap perbukitan Menoreh dan keagungan Candi Borobudur yang luar biasa. Namun, yang kami rasakan membedakan kami dari desa lainnya adalah keramahan yang asli, otentik!”* (wawancara dengan KDS).

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat merasa nilai-nilai mereka tercermin dalam promosi pariwisata, hal ini dapat memperkuat rasa memiliki dan keterikatan terhadap komunitas dan merek destinasi (Valentinov, 2013). Dengan mengadopsi keramahan sebagai bagian dari identitas merek, Desa wisata Wanurejo tidak hanya menarik wisatawan tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan kebanggaan komunitas, menciptakan destinasi yang autentik dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan konsep *bonding* yang dikemukakan oleh Putnam (2000) dan Bakker et al. (2019), yang menekankan bahwa ikatan sosial dalam kelompok homogen berfungsi sebagai *social glue* yang memperkuat kohesi dan dukungan emosional. Dalam konteks krisis, *bonding* berperan sebagai *informal safety net* yang memungkinkan komunitas bertahan ketika sistem formal belum berfungsi optimal (Panday et al., 2021). Lebih jauh, komunikasi yang intens dan berulang sebagaimana ditemukan di Wanurejo mencerminkan apa yang disebut (Gössling et al., 2020) sebagai *relational resilience*, yaitu ketahanan yang dibangun melalui relasi sosial yang bermakna, bukan semata-mata melalui sumber daya material. Dengan demikian, *bonding* di Desa Wisata Wanurejo berfungsi sebagai fondasi awal pemulihan, terutama dalam membangun solidaritas dan stabilitas sosial. Namun, sifatnya yang eksklusif berpotensi juga membatasi akses bagi individu yang berada di luar lingkaran relasi inti.

## **Eksplorasi Hubungan dengan Kelompok Lain di Luar Komunitas Inti**

Fase kedua dalam tanggap bencana mencerminkan risiko pengecualian terhadap kelompok terpinggirkan setelah kedatangan bantuan dari luar, yang sering kali menciptakan kesenjangan akses dan ketidaksetaraan distribusi sumber daya. Bantuan yang datang dari pemerintah, LSM dan organisasi kemanusiaan sering kali terbatas, sehingga memicu kompetisi di antara masyarakat. Sementara itu, faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan wisata antara lain adalah dukungan dari pemerintah, keterlibatan komunitas (Espeso-Molinero & Pastor-Alfonso, 2020; Jugmohan et al., 2020; Manaf et al., 2018). Ketidakseimbangan ini terjadi karena beberapa kelompok, seperti perempuan, lansia, atau keluarga dengan kepala rumah tangga perempuan, kurang memiliki koneksi atau kemampuan untuk bersaing secara langsung dalam mengakses bantuan. Selain itu, distribusi bantuan yang berpusat di lokasi tertentu dapat mengabaikan masyarakat di wilayah terpencil, sehingga memperparah ketimpangan. Sebagai contoh, di Desa Wanurejo, ketika bantuan berupa makanan pokok, masker, obat-obatan ataupun vaksin, individu yang memiliki koneksi dengan aktivis lokal atau perwakilan politik cenderung mendapatkan akses lebih cepat. Sementara itu, perempuan dan lansia sering kali kesulitan bersaing dalam mendapatkan sumber daya ini.

Pada aspek *bridging*, komunikasi berlangsung secara lebih formal dan terbuka melalui interaksi lintas kelompok yang melibatkan aktor dengan latar belakang sosial dan kepentingan yang beragam, seperti komunitas desa wisata lain, pelaku usaha, asosiasi pariwisata, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Pola komunikasi ini memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan praktik baru, sehingga komunitas desa wisata memperoleh akses terhadap inovasi, peluang ekonomi, serta jejaring yang lebih luas di tingkat regional maupun nasional. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa *bridging* cenderung bersifat selektif, karena kelompok dengan kapasitas komunikasi dan posisi sosial yang lebih kuat lebih mudah memanfaatkan jejaring eksternal tersebut. Oleh karena itu, meskipun *bridging* berfungsi sebagai jembatan strategis yang membuka akses ke dunia luar, efektivitasnya sangat bergantung pada keberadaan mekanisme komunikasi yang inklusif agar tidak memunculkan ketimpangan baru di dalam komunitas.

Hasil wawancara menunjukkan adanya komunikasi formal lintas kelompok. *Bridging* dalam fase pemulihan awal melibatkan koneksi lintas kelompok dalam komunitas. Desa Wisata Wanurejo memanfaatkan hubungan lintas kelompok dalam masyarakat untuk memobilisasi sumber daya yang lebih besar selama masa pandemi. Dengan berkolaborasi antar kelompok lokal, misalnya kelompok petani, seniman, komunitas pemilik *homestay*, dan pelaku UMKM bekerja sama untuk membuat produk kreatif seperti masker batik dan kerajinan berbasis budaya yang dapat dijual secara daring, Ketua Pokdarwis menyampaikan:

*“Kami mulai sering diajak diskusi dengan desa wisata lain, juga dengan kampus dan komunitas kreatif. Dari situ kami belajar cara promosi online dan paket wisata”* (wawancara dengan PDW).

Dokumentasi kegiatan memperlihatkan adanya pelatihan, kolaborasi produk kreatif, dan pertemuan lintas komunitas yang melibatkan aktor dengan latar belakang berbeda. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi membuka ruang pertukaran informasi, ide, dan peluang baru yang sebelumnya tidak tersedia dalam jaringan internal desa. Heterogenitas aktor justru

menjadi sumber inovasi dalam proses pemulihan ekonomi. Hal ini membantu menciptakan sumber pendapatan alternatif selama pariwisata belum pulih sepenuhnya serta menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat secara keseluruhan dengan cara kolaborasi antarkelompok.

Secara teoretis, *bridging* memungkinkan komunitas mengakses peluang dan informasi baru melalui hubungan horizontal lintas kelompok (Castro-Arce & Vanclay, 2020; Khalid et al., 2019). Peneliti lain menegaskan bahwa *bridging* berperan penting dalam memperluas wawasan dan mendorong adaptasi sosial (Mathews, 2021). Penelitian dari Ola et al., (2020) menjelaskan *bridging* memegang peran penting dalam membangun sinergi antar kelompok masyarakat, seperti yang dijelaskan pada temuan penelitiannya bahwa antara komunitas Sama Bajo dan masyarakat darat di pulau-pulau sekitar. Modal sosial ini berfungsi sebagai penghubung yang memungkinkan terjadinya interaksi, saling pengertian, dan kerja sama dalam pelestarian sumber daya alam serta pengembangan pariwisata bahari. Kekuatan modal sosial berperan penting dalam membangun kerja sama yang harmonis antar komunitas lintas agama, menciptakan daya tarik bagi wisatawan, serta mendorong pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. *Bridging* dan *bonding* memiliki karakteristik khas yang memainkan peran penting dalam memberikan makna serta menunjukkan efektivitas dari kekuatan modal sosial itu sendiri (Musavengane & Kloppers, 2020). Sementara itu keberadaan modal sosial dalam suatu komunitas menjadi kunci agar masyarakat memiliki daya lenteng yang lebih baik dalam menghadapi berbagai perubahan (Li & Hunter, 2015).

Temuan di Wanurejo juga menguatkan argumen Gabriel-Campos et al., (2021) bahwa *bridging* tidak selalu inklusif. Kelompok dengan kapasitas komunikasi dan modal budaya lebih tinggi cenderung lebih diuntungkan, sementara kelompok rentan berpotensi tertinggal. Meskipun aktivis lokal mencoba mengurangi ketidaksetaraan dengan memberikan bantuan kepada kelompok tertentu yang sudah mereka kenal sebelumnya, banyak keluarga di daerah yang lebih terpencil tetap tidak tersentuh karena tidak terhubung dengan jaringan distribusi utama. Fase ini menunjukkan bahwa tanpa mekanisme distribusi yang inklusif, kedatangan bantuan eksternal justru dapat memperburuk ketidaksetaraan di masyarakat, sehingga perlu pendekatan yang mempertimbangkan keterlibatan semua kelompok, khususnya yang paling rentan. Dengan demikian, *bridging* berkontribusi pada inovasi dan pemulihan ekonomi, tetapi perlu dikelola secara sadar agar tidak menciptakan eksklusi sosial baru di dalam komunitas.

### **Eksplorasi Keterhubungan dengan Pemerintah, dan Organisasi Lain yang Berkontribusi terhadap Keberlanjutan Desa Wisata Setelah Pandemi**

Pada fase ketiga tanggap bencana, modal sosial menjadi faktor krusial sekaligus problematis karena meskipun mendukung pemulihan, ia juga berpotensi mereproduksi ketidaksetaraan yang telah ada. Berbagai bentuk modal sosial (*bonding*, *bridging*, dan *linking*) dimobilisasi sebagai respons kolektif melalui kerja sukarela, dukungan program kesehatan, serta fasilitasi akses sumber daya selama masa krisis. Modal sosial *bridging*, khususnya, memungkinkan komunitas menjangkau ide, informasi, dan jejaring baru melalui hubungan lintas kelompok yang heterogen (Burt, 1997; Putnam, 2020), sementara *bonding* memperkuat solidaritas internal berbasis kesamaan nilai dan norma (Coleman, 1990). Namun, evaluasi temuan menunjukkan bahwa keluarga dengan modal sosial *linking* yang lemah mengalami

hambatan signifikan dalam mengakses bantuan material dan finansial, terutama perempuan, lansia, dan warga di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan komunikasi dengan institusi formal. Kondisi ini menegaskan bahwa tanpa mekanisme inklusif, pemanfaatan modal sosial dalam fase rekonstruksi tidak hanya mempercepat pemulihan bagi sebagian kelompok, tetapi juga memperdalam ketimpangan akses dan kerentanan sosial di tingkat komunitas.

Kebijakan distribusi bantuan sering kali diskriminatif, di mana hanya sebagian warga yang menerima hibah rekonstruksi. Lansia yang kurang dukungan sosial atau berada di daerah dengan aksesibilitas rendah harus tinggal di tempat penampungan sementara selama bertahun-tahun setelah bencana, menunjukkan lemahnya modal sosial *linking* yang dimiliki. Meskipun modal sosial memainkan peran penting dalam pemulihan, ketimpangan akses dan ketergantungan pada jaringan sosial yang tidak merata dapat menciptakan hambatan bagi kelompok rentan, sehingga diperlukan kebijakan rekonstruksi yang inklusif dan sensitif terhadap konteks sosial untuk mencegah penguatan ketidaksetaraan. Secara umum, pariwisata pedesaan di Wanurejo telah mempengaruhi distribusi sumber daya dan dinamika kekuasaan dalam berbagai cara, termasuk munculnya gentrifikasi yang semakin memperlebar kesenjangan sosial. Seiring dengan meningkatnya jumlah investor yang tertarik dengan pengembangan pariwisata desa, akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi semakin eksklusif.

Hasil wawancara dengan aparat desa dan pengelola BUMDes menunjukkan bahwa akses terhadap program bantuan dan kebijakan sangat bergantung pada relasi dengan pemerintah.

*“Yang aktif di BUMDes atau sering berhubungan dengan dinas biasanya lebih cepat tahu soal program bantuan”* (wawancara dengan BDS).

Observasi peneliti juga menunjukkan bahwa tidak semua warga memahami prosedur administratif atau memiliki saluran komunikasi langsung dengan pemerintah. Juga ditemukan bahwa kelompok elit ataupun individu-individu kaya yang mampu mendapatkan akses sumber daya dan akan cenderung memperkuat hubungan di antara mereka yang memiliki status serupa. Fenomena ini telah menyebabkan segregasi sosial yang semakin nyata. Saat ini stratifikasi sosial lebih besar dibandingkan masa lalu, dan fokus terhadap stratifikasi ini semakin meningkat. Selain memiliki kekayaan finansial yang besar, komunitas elit ini juga memperoleh akses terhadap sumber daya, peluang, dan otoritas yang lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Dengan demikian, meskipun desa wisata membawa pertumbuhan ekonomi, ia juga mendorong stratifikasi sosial yang semakin tajam, di mana akses terhadap sumber daya dan kekuasaan menjadi semakin terpusat di tangan kelompok masyarakat kaya, sementara kelompok lain semakin tersisihkan. Data ini menunjukkan bahwa komunikasi *linking* bersifat hierarkis dan selektif. Akses terhadap sumber daya formal sangat ditentukan oleh posisi sosial dan kedekatan dengan struktur kekuasaan.

Kekhawatiran yang lain juga muncul dalam percakapan sehari-hari dengan anggota masyarakat yaitu bagaimana kelompok masyarakat elit memanfaatkan jaringan eksklusif mereka untuk memperoleh pengaruh politik dalam pengambilan keputusan pembangunan yang menguntungkan mereka secara pribadi. Dengan sumber daya yang melimpah dan akses ke jaringan elit, yang memiliki kemampuan lebih mampu mananamkan pengaruh mereka dalam proses politik dan pengambilan kebijakan. Mereka tidak hanya berpartisipasi langsung dalam pemerintahan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi perwakilan politik agar

mendukung kepentingan mereka. kelompok elit ini telah “sangat terlibat dalam banyak diskusi politik,” baik dengan menduduki posisi sebagai anggota BUMDes maupun PemDes. Fenomena ini menunjukkan adanya model tata kelola berbasis pertumbuhan (*pro-growth governance*), di mana pengambilan keputusan cenderung terbatas pada kelompok elit yang memiliki kekayaan dan kekuasaan (Giuliani et al., 2020). Dengan demikian, konsentrasi kekuasaan dalam jaringan eksklusif kelompok kaya ini mempersempit ruang partisipasi masyarakat umum dalam pengambilan keputusan, menjadikan pembangunan lebih berpihak pada kepentingan segelintir elit dibandingkan kebutuhan komunitas secara keseluruhan.

Pada aspek *linking*, komunikasi berlangsung secara vertikal antara masyarakat dan institusi yang memiliki otoritas, seperti pemerintah dan lembaga formal, sehingga berperan penting dalam membuka akses terhadap sumber daya, program pemulihan, dan kebijakan pascapandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor lokal yang mampu menjalin komunikasi dengan struktur pemerintahan memiliki posisi strategis sebagai perantara dalam menghubungkan komunitas dengan sumber daya formal. Namun, komunikasi *linking* juga sarat dengan relasi kekuasaan, karena akses terhadap kebijakan dan bantuan sangat dipengaruhi oleh posisi sosial, kedekatan dengan elit, dan kemampuan memahami mekanisme birokrasi. Akibatnya, kelompok tertentu cenderung kurang terwakili dan mengalami keterbatasan akses. Oleh karena itu, *linking* tidak hanya berkaitan dengan keterhubungan institusional, tetapi juga dengan distribusi suara dan kapasitas negosiasi, di mana pola komunikasi yang tidak inklusif berpotensi memperkuat ketimpangan, sementara pendekatan yang partisipatif dapat mendorong pemberdayaan komunitas.

Partisipasi masyarakat dalam proses tata kelola pariwisata di Desa Wanurejo sangat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan yang ada, di mana ketimpangan distribusi sumber daya dan kurangnya transparansi pemerintah berkontribusi pada semakin terpinggirkannya kelompok masyarakat yang tidak memiliki modal ekonomi dan politik yang cukup. Ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan pengaruh politik menciptakan perasaan ketidakberdayaan di kalangan masyarakat yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam keputusan-keputusan pariwisata. Hal ini memperburuk sikap apatis terhadap keterlibatan dalam tata kelola pariwisata. Banyak anggota komunitas merasa bahwa mereka tidak memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan, yang menyebabkan sikap ketidakpedulian kolektif. Mayoritas masyarakat merasa bahwa mereka “tidak memiliki kepentingan langsung dalam pembangunan desa wisata ini.” Sikap sinis terhadap keputusan pemerintah semakin mengurangi keinginan mereka untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan demikian, ketimpangan sumber daya dan kurangnya transparansi pemerintah memperburuk keterpinggiran sosial dan politik masyarakat dalam tata kelola pariwisata, yang pada akhirnya mengurangi partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tiga bentuk modal sosial, yaitu *bonding*, *bridging*, *linking*, memiliki peran berbeda dalam berbagai fase respons terhadap bencana. Dalam fase awal setelah pandemi, masyarakat cenderung mengandalkan modal sosial *bonding* dan *bridging* yang telah ada sebelumnya untuk bekerja sama dalam menjaga kesehatan, berbagi makanan, dan membangun tempat penampungan karantina. Setelah bantuan eksternal tiba, *linking* menjadi lebih dominan karena memungkinkan masyarakat mengakses sumber daya dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional. Misalnya, kerja sama

berbasis *bonding* dan *bridging* membantu masyarakat bertahan pada tahap awal, sementara *linking* berperan dalam pemulihan jangka panjang dengan memfasilitasi distribusi bantuan dan rekonstruksi infrastruktur. Oleh karena itu, memahami dinamika modal sosial dalam setiap fase pandemi sangatlah penting untuk merancang strategi penanggulangan yang efektif, memastikan keterlibatan masyarakat, serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya untuk mendukung pemulihan berkelanjutan.

Setelah bantuan tiba pascapandemi pada tahun 2022, modal sosial *linking* cenderung lebih menguntungkan kelompok sosial ekonomi, geografis, dan budaya tertentu yang memiliki akses langsung ke pemerintah atau lembaga non-pemerintah. Hal ini menyebabkan kelompok terpinggirkan, seperti perempuan, lansia, dan mereka yang tinggal jauh dari desa, kesulitan dalam mengakses modal sosial yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, distribusi bantuan yang sering terpusat di wilayah tertentu semakin memperbesar ketimpangan akses terhadap sumber daya. Di Desa Wanurejo ditunjukkan bahwa meskipun modal sosial dapat mempercepat pemulihan bagi sebagian kelompok, ia juga dapat memperburuk ketimpangan dengan menghambat akses perempuan dan lansia terhadap bantuan serta proses pembangunan kembali. Oleh karena itu, meskipun modal sosial berperan penting dalam pemulihan bencana, perlu ada kebijakan distribusi yang lebih inklusif agar kelompok rentan tidak semakin terpinggirkan dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi.

Kelompok rentan, seperti keluarga tanpa laki-laki dewasa, terutama perempuan lajang, mengalami kesulitan dalam membangun modal sosial yang diperlukan untuk mengakses sumber daya pascabencana. Hal ini disebabkan oleh lemahnya hubungan *bonding* dalam komunitas serta keterbatasan dalam membentuk *bridging* dan *linking*. Selain itu, norma budaya yang membatasi pergerakan perempuan semakin menghambat kemampuan mereka untuk menjalin koneksi dengan pihak luar yang dapat membantu dalam proses pemulihan. Dalam budaya Jawa, seringkali laki-laki yang membentuk hubungan *bridging* dan *linking*, dan yang mengambil peran dalam mencari bantuan keuangan maupun material. Hal ini dapat secara signifikan menghambat kemampuan perempuan untuk membangun modal sosial di luar komunitas terdekat mereka. Ini dapat membatasi akses mereka ke informasi, sumber daya, dan jaringan dukungan yang penting untuk pemulihan setelah krisis. Misalnya, pascapandemi rumah tangga yang dikepalai perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling dirugikan karena keterbatasan akses terhadap jaringan sosial yang dapat memberikan bantuan. Oleh karena itu, dalam upaya penanggulangan bencana, perlu ada kebijakan untuk kelompok rentan, agar mereka dapat lebih mudah mengakses bantuan dan membangun kembali kehidupan mereka secara mandiri. Keberhasilan pemulihan sangat bergantung pada kesiapan dan komitmen pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat secara merata, yang dapat menjadi tantangan jika tidak semua pihak mendapatkan perhatian dan dukungan yang cukup (Chenhall et al, 2010).

Sebagai rekomendasi, praktik bantuan pascapandemi di masa depan harus memastikan bahwa kelompok terpinggirkan memiliki akses yang setara terhadap dukungan darurat dan bantuan jangka panjang untuk pembangunan kembali. Distribusi bantuan tidak boleh didasarkan pada aturan keuntungan relatif, di mana individu dengan posisi sosial dan pengaruh politik yang lebih kuat mendapatkan manfaat lebih besar. Untuk mengatasi hal ini, perencanaan program pengurangan risiko bencana harus mempertimbangkan bagaimana modal sosial, baik

*bonding*, *bridging*, maupun *linking*, dipengaruhi oleh ketidaksetaraan sosial, budaya, gender, dan geografis yang telah ada sebelumnya. Penggunaan LSM atau organisasi kemasyarakatan lokal yang telah berakar dalam komunitas dapat membantu mengidentifikasi populasi yang paling rentan dan memastikan bahwa *linking* tidak hanya menguntungkan kelompok elit. Selain itu, mendukung perempuan dalam membangun jaringan sosial dengan sesama perempuan, LSM lokal, dan pemimpin masyarakat dapat meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya. Sehingga, pemerintah dan lembaga kemanusiaan harus secara adil memanfaatkan modal sosial masyarakat dan memastikan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mendukung kelompok rentan, perempuan, dan lansia dalam proses pemulihan pasca pandemi.

Kekuasaan dalam bentuk pengaruh tidak hanya terbatas pada individu yang memiliki sumber daya, tetapi juga dapat dicapai melalui mobilisasi sumber daya yang dimiliki masyarakat. Banyak inisiatif masyarakat yang menunjukkan bahwa kekuasaan dapat diwujudkan melalui pengumpulan dan penggerakan sumber daya bersama, seperti pengetahuan tentang tata kelola pemerintah desa, hubungan sosial, dan harapan masyarakat untuk terlibat dalam keputusan. Revitalisasi kegiatan budaya tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian tradisi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat *bonding* sosial dan membangkitkan semangat komunitas. Selama pandemi, pengelola dan masyarakat Desa Wanurejo tidak menyerah, tetapi segera bangkit dan berbenah mencari solusi ke depannya. Mereka mengajarkan masyarakat berjualan online melalui media sosial, mengingat mayoritas pekerja Desa Wisata Wanurejo adalah pedagang. Selain itu, penerapan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk meningkatkan ketahanan warga dalam menghadapi situasi krisis akibat pandemi. Literasi dan partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam mendukung kebijakan penguatan resiliensi pasca pandemi. Dengan pemahaman yang baik tentang tata kelola pemerintah desa, masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan bersama.

Distribusi sumber daya dalam masyarakat mencerminkan dinamika kekuasaan yang kompleks, di mana elit, tokoh masyarakat dan individu kaya cenderung memiliki keunggulan dalam mengakumulasi modal sosial pribadi, sementara kelompok lain dapat mengalami hambatan dalam mengembangkan modal sosial mereka. Namun, di sisi lain, adanya mobilisasi sumber daya dan hubungan sosial yang terjalin di antara kelompok masyarakat menunjukkan bahwa modal sosial tetap dapat berkembang dalam skala yang lebih luas. Kesediaan masyarakat untuk melakukan tindakan kolektif menjadi bukti bahwa meskipun terdapat ketimpangan dalam distribusi modal sosial, solidaritas sosial tetap bisa tumbuh dan memberikan dampak positif bagi kelompok yang lebih luas. Selama pandemi COVID-19, distribusi sumber daya dan dinamika modal sosial di Desa Wanurejo mencerminkan upaya kolektif masyarakat dan pemerintah desa dalam menghadapi tantangan yang ada. Misalnya dengan penggunaan dana desa untuk penanganan pandemi, membentuk inisiatif lokal yang mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan bersama, BUMDes dalam mendukung perekonomian desa selama pandemi dengan mengelola sumber daya lokal dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat, dan juga Pemerintah desa memastikan program jaring pengaman sosial, seperti Program Keluarga Harapan dan bantuan sosial tunai, berjalan efektif dan tepat sasaran untuk mendukung masyarakat terdampak pandemi.

## Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa modal sosial *bonding*, *bridging*, dan *linking* memainkan peran yang saling melengkapi dalam proses pemulihan Desa Wisata Wanurejo pascapandemi COVID-19, khususnya dalam menjaga kohesi sosial, memperluas jejaring, dan membuka akses terhadap sumber daya formal. Modal sosial *bonding* berfungsi sebagai fondasi pemulihan awal melalui komunikasi yang intens dan emosional antarwarga, yang memperkuat solidaritas, kepercayaan, serta praktik saling membantu ketika akses terhadap sumber daya eksternal masih terbatas. Modal sosial *bridging* berkontribusi dalam tahap pemulihan berikutnya dengan membuka akses terhadap informasi, inovasi, dan peluang ekonomi melalui interaksi lintas kelompok dan jejaring eksternal, meskipun dalam praktiknya manfaat tersebut lebih mudah diakses oleh kelompok yang memiliki kapasitas komunikasi dan posisi sosial yang lebih kuat. Sementara itu, modal sosial *linking* menjadi penentu penting dalam keberlanjutan pemulihan jangka panjang karena memungkinkan komunitas mengakses kebijakan, program bantuan, dan dukungan kelembagaan dari pemerintah dan institusi formal, namun juga memperlihatkan adanya relasi kekuasaan yang menyebabkan akses tersebut tidak merata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kapasitas modal sosial, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, gender, dan keterpenciran geografis, membentuk ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan partisipasi, sehingga berimplikasi langsung pada tingkat ketahanan dan keberlanjutan pemulihan desa wisata. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi modal sosial dalam pengembangan desa wisata pascapandemi memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan agar manfaat pemulihan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

## Referensi

- Alfrojems, & Anugrahini, T. (2019). Pengentasan Kemiskinan Perdesaan Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Modal Sosial. *Sosio Informa*, 5(2), 113–127. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/pengentasan-kemiskinan-perdesaan-melalui-pengembangan-ekonomi-kre>
- Arief, M., Mustikowati, R. I., Fathor, A. S., & Syarif, Muh. (2022). Tourist Destination based on SMEs innovation: a lesson from Madura Island, Indonesia. *WSEAS TRANSACTIONS ON BUSINESS AND ECONOMICS*, 19, 1008–1018. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.88>
- Aji, R. R. (2020). Tourism social entrepreneurship in community-based tourism: A case study of Pentingsari tourism village. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 447(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/447/1/012009>
- Bakker, Y. W., de Koning, J., & van Tatenhove, J. (2019). Resilience and social capital: The engagement of fisheries communities in marine spatial planning. *Marine Policy*, 99(February 2018), 132–139. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.09.032>
- Behsudi, A. (2020, December). *Tourism-dependent economies are among those harmed the most by the pandemic*. International Monetary Fund.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Pemulihan Pariwisata Domestik Indonesia 2022*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/02/2041/pemulihan-pariwisata-domestik-indonesia-2022-.html>
- Bakker, Y. W., de Koning, J., & van Tatenhove, J. (2019). Resilience and social capital: The engagement of fisheries communities in marine spatial planning. *Marine Policy*,

- 99(February 2018), 132–139. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.09.032>
- Burt, R., (1997). The contingent value of social capital. *Adm. Sci. Q.* 42, 339–365. <https://doi.org/10.2307/2393923>.
- Castro-Arce, K., & Vanclay, F. (2020). Transformative social innovation for sustainable rural development: An analytical framework to assist community-based initiatives. *Journal of Rural Studies*, 74(January 2019), 45–54. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.11.010>
- Chenhall, R., Hall, M., Smith, D., 2010. Social capital and management control systems: a study of a non-government organization. *Acc. Organ. Soc.* 35 (8), 737–756. <https://doi.org/10.1016/j-aos.2010.09.006>.
- Coleman, J., 1990. Foundations of Social Theory. Harvard University Press, Cambridge, MA.
- Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2002). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. *Teaching Sociology*, 30(3), 380. <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Espeso-Molinero, P., & Pastor-Alfonso, M. J. (2020). Governance, community resilience, and indigenous tourism in Nahá, Mexico. *Sustainability (Switzerland)*, 12(15). <https://doi.org/10.3390/su12155973>
- Fatimah, T. (2018). Community-based spatial arrangement for sustainable village environmental improvement – case study of Candirejo Village, Borobudur, Indonesia. *Energy Procedia*, 153, 389–395. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.10.074>
- Gabriel-Campos, E., Werner-Masters, K., Cordova-Buiza, F., & Paucar-Caceres, A. (2021). Community eco-tourism in rural Peru: Resilience and adaptive capacities to the Covid-19 pandemic and climate change. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 48(October 2020), 416–427. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.07.016>
- Gilang, Harifudin, & Bahri, S. (2024). *Peran Modal Sosial Terhadap Peternak Ayam Bloiler Di Desa Punaga Kecamatan Laikang Kabupaten Takalar*. 4(1), 33–41. <https://doi.org/10.56326/jsk.v4i1.4873>
- Giuliani, G., Chatenoux, B., Benvenuti, A., Lacroix, P., Santoro, M., & Mazzetti, P. (2020). Monitoring land degradation at national level using satellite Earth Observation time-series data to support SDG15 – exploring the potential of data cube. *Big Earth Data*, 4(1), 3–22. <https://doi.org/10.1080/20964471.2020.1711633>
- Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708>
- Hall, C. M., Prayag, G., & Amore, A. (2017). Tourism and Resilience. Channel View Publications. <https://doi.org/10.21832/HALL6300>
- Handaka, T., Wahyuni, H. I., Sulastri, E., & Wiryono, P. (2015). Social Capital and Communication Systems of Ettawa Goat Breeders in Purworejo Regency. *Komunitas*, 7(2), 307–315. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v7i2.4479>
- Jugmohan, S., Giampiccoli, A., Vallabh, D., & Mtapuri, O. (2020). A model of CBT networks and organizations: An African perspective and beyond. *Forum Geografic*, 19(1), 105–115. <https://doi.org/10.5775/FG.2020.104.I>
- Khalid, S., Ahmad, M. S., Ramayah, T., Hwang, J., & Kim, I. (2019). Community empowerment and sustainable tourism development: The mediating role of community support for tourism. *Sustainability (Switzerland)*, 11(22). <https://doi.org/10.3390/su11226248>
- Kristianto, B., Listyowati, Dewi, A. T. T., Garnisa, G., & Hasanah, S. M. (2021). Pariwisata Indonesia Pasca Pandemi, Pemulihan Pasar, dan Kerja Sama dengan Kawasan Amerika: Perlunya Konsolidasi Nasional.
- Li, Y., & Hunter, C. (2015). Community involvement for sustainable heritage tourism: a

- conceptual model. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 5(3), 248–262. <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-08-2014-0027>
- Manaf, A., Purbasari, N., Damayanti, M., Aprilia, N., & Astuti, W. (2018). Community-based rural tourism in inter-organizational collaboration: How does it work sustainably? Lessons learned from Nglanggeran Tourism Village, Gunungkidul Regency, Yogyakarta, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/su10072142>
- Mathews, M. C. (2021). How village leaders in rural Amazonia create bonding, bridging, and linking social capital configurations to achieve development goals, and why they are so difficult to maintain over time. *World Development*, 146, 105541. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105541>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Musavengane, R., & Kloppers, R. (2020). Social capital: An investment towards community resilience in the collaborative natural resources management of community-based tourism schemes. *Tourism Management Perspectives*, 34(February), 100654. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100654>
- Norzistya, A. D., & Handayani, W. (2020). Modal sosial dalam ketahanan komunitas terhadap bencana banjir di Kelurahan Kemijen dan Krobokan, Kota Semarang. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 15(2), 206. <https://doi.org/10.20961/region.v15i2.29694>
- Ola, T. La, Wianti, N. I., & Tadjuddah, M. (2020). *Bridging dan Bonding Social Capital : Analisis Relasi Sosial Masyarakat Pulau-Pulau Kecil*. 08(01), 30–46. <https://doi.org/10.22500/8202028593>
- Ooi, N., Laing, J., & Mair, J. (2015). Social capital as a heuristic device to explore sociocultural sustainability: a case study of mountain resort tourism in the community of Steamboat Springs, Colorado, USA. *Journal of Sustainable Tourism*, 23(3), 417–436. <https://doi.org/10.1080/09669582.2014.957211>
- Panday, S., Rushton, S., Karki, J., Balen, J., & Barnes, A. (2021). The role of social capital in disaster resilience in remote communities after the 2015 Nepal earthquake. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 55(December2020), 102–112. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102112>
- Prakoso, A. A., Pradipto, E., & Roychansyah, M. S. (2021). Stages of Rural Transformation in the National Strategic Tourism Area of Borobudur. *The Journal of Environmental and Tourism Analyses*, 9(1), 31–46. <https://doi.org/10.5719/jeta/9.1/3>
- Putnam, R.,(2000). *Bowling Alone : The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster, New York.
- Rocca, L. H. D., & Zielinski, S. (2022). Community-based tourism, social capital, and governance of post-conflict rural tourism destinations: the case of Minca, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. *Tourism Management Perspectives*, 43(January), 100985. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.100985>
- Sangchumnong, A. (2018). Development of a sustainable tourist destination based on the creative economy: A case study of Klong Kone Mangrove Community, Thailand. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 40(3), 642–649. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.02.002>
- Sari, N. M., Nugroho, I., Julitasari, E. N., & Hanafie, R. (2022). The Resilience of Rural Tourism and Adjustment Measures for Surviving The COVID-19 Pandemic: Evidence from Bromo Tengger Semeru National Park, Indonesia. *Forest and Society*, 67–83. <https://doi.org/10.24259/fs.v6i1.18054>
- Satriya, C. Y., Wahyuni, H. I., & Sulastri, E. (2023). Socio-ecological Resilience and Social

- System in Candirejo Village, Magelang: A Case Study on Sustainable Tourism Development. . Journal of Resilient Economies, 3(2), 24–43.
- Sucipto, R. H. (2021, March 11). Wisata ASEAN Kelam. Republika.Id. <https://www.republika.id/posts/14879/wisata-asean-kelam>
- Valentinov, V. (2013). Corporate social responsibility and sustainability: insights from Boulding and Luhmann. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 20(4), 317–324. <https://doi.org/10.1080/13504509.2013.808282>
- Weis, K., Chambers, C., & Holladay, P. J. (2021). Social-ecological resilience and community-based tourism in the commonwealth of Dominica. Tourism Geographies, 23(3), 458–478. <https://doi.org/10.1080/14616688.2021.1878267>